

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Allhudori pada tahun 2017 yang berjudul “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin di Provinsi Jambi”. Dimana alat analisisnya menggunakan regresi berganda, metode Ordinary Least Square (OLS) dan data Cross-section yang menghasilkan bahwa variable Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki nilai koefisien 0,358 yang berpengaruh positif terhadap penduduk miskin di provinsi jambi dengan artian apabila Indeks Pembangunan Manusia naik 1% maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin di provinsi jambi sebesar 0,358 jiwa. Variable Produk Domestik Regional Bruto memiliki nilai koefisien -0,006 yang berpengaruh negative terhadap penduduk miskin di provinsi jambi dengan artian apabila Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) naik 1% maka akan menurunkan jumlah penduduk miskin di provinsi jambi sebesar 0,006 jiwa. Dan variable Pengangguran memiliki nilai koefisien 0,010 yang berpengaruh positif terhadap penduduk miskin di provinsi jambi dengan artian apabila jumlah pengangguran naik sebesar 1% maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin di provinsi jambi sebesar 0,010 jiwa.

Penelitian yang dilakukan oleh Cholili pada tahun 2014 yang berjudul “ Analisis Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

(Studi Kasus 33 Provinsi di Indonesia)”. Dimana alat analisisnya menggunakan uji regresi berganda dan data panel yang menghasilkan bahwa variable Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki nilai koefisien sebesar 0,053 dan bertanda negative, yang menyatakan dimana bentuk hubungan dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap kemiskinan berbanding terbalik atau dengan artian peningkatan faktor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat sebesar 1 miliar, maka akan menurunkan kemiskinan hanya sebesar 0,053 ribu jiwa saja, sehingga variable Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan di indonesia. Variable pengangguran memiliki nilai koefisien sebesar 0,832 yang bertanda positif signifikan menyatakan bahwa dimana pengangguran terhadap kemiskinan berbanding lurus dengan artian peningkatan pada faktor pengangguran sebesar 1000 jiwa maka akan meningkatkan pula pada kemiskinan dengan nilai sebesar 0,832 ribu jiwa, sehingga variable pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di indonesia. Sedangkan variable Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki nilai dengan koefisien sebesar 8,437 yang bertanda negative serta menyatakan bahwa bentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan berbanding terbalik atau dengan artian bahwa peningkatan pada faktor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 1 maka akan menurunkan kemiskinan dengan nilai sebesar 8,437 ribu jiwa, sehingga pada variable Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negative dan signifikan terhadap kemiskinan di indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Ningrum pada tahun 2017 dimana yang berjudul “Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2011-2015”. Dimana alat analisisnya menggunakan uji regresi berganda dan data panel yang menghasilkan bahwa variable TPT memiliki nilai koefisien 0,073014 berpengaruh positif serta signifikan terhadap jumlah penduduk miskin dengan artian apabila TPT naik 1 persen maka dapat meningkatkan kemiskinan sebesar 0,073014 persen. Variable IPM memiliki nilai koefisien sebesar -0,865177 berpengaruh negative serta signifikan terhadap jumlah penduduk miskin dengan artian apabila IPM naik sebesar 1 persen, maka dapat mengurangi kemiskinan sebesar 0,865177 persen. Dan variable Upah Minimum memiliki nilai koefisien sebesar 1.33E-06 berpengaruh positif serta signifikan terhadap jumlah penduduk miskin dengan artian Upah Minimum meningkat sebesar 1 juta rupiah maka dapat meningkatkan kemiskinan sebesar 1.33E-06 juta rupiah.

B. Landasan Teori

1. Tingkat Kemiskinan

a. Definisi Kemiskinan

Definisi serta konsep dari kemiskinan sangatlah beragam, secara umum kemiskinan yakni dimana sekelompok atau individu yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam aspek kehidupan.

Menurut Andre Bayo Ala (1998) dalam Arsyad (1992) dimana kemiskinan sendiri merupakan multidimensial yang artian kebutuhan manusia sangat

beranekaragam begitu juga dengan kemiskinan memiliki banyak aspek, seperti aspek primer yang berupa miskin asset, pengetahuan, organisasi dalam politik serta keterampilan. Sedangkan aspek sekunder berupa miskin jaringan social, informasi serta sumber keuangan. Ukuran kemiskinan sendiri berupa bentuk seperti kurangnya perawatan dalam segi kesehatan, rendahnya pendidikan serta perumahan yang layak.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan nilai pengeluaran dalam kebutuhan makanan meminimumkan yang disetarakan dengan 2.100 kalori perkapita dalam perhari.

b. Ukuran Kemiskinan

Dalam mengukur kemiskinan dimana Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dimana pendekatan kemiskinan ini dipandang sebagai ketidakmampuan dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan terdiri dari 2 komponen sebagai berikut:

- a) Garis Kemiskinan Makan (GKM) dimana nilai pengeluaran kebutuhan makan dan minum serta dengan 2100 kilo kalori perhari. Sedangkan
- b) Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) dimana kebutuhan minimum adalah untuk perumahan, pendidikan dan kesehatan yang diwakili oleh 51 jenis komoditi.

Dimana rumus untuk menghitung Garis Kemiskinan (GK) sebagai berikut:

$$GK = GKM + GKNM$$

Keterangan :

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non-Makanan

c. Persentase Penduduk Miskin

Head Count Index (HCI-P0) dimana persentase penduduknya berada pada garis kemiskinan bawah.

d. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1)

Merupakan ukuran dari rata-rata kesenjangan yang terdapat pada pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Dimana semakin tinggi nilai indeksnya maka akan semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinannya.

Rumus untuk menghitung indeks kedalaman kemiskinan sebagai berikut:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left(\frac{z - y_i}{z} \right)^{\alpha}$$

Keterangan:

$\alpha = 1$

z = Garis Kemiskinan

y_i = Rata-rata pengeluaran perkapita dalam sebulan yang berada di bawah garis kemiskinan ($i = 1, 2, 3, \dots, q$) $y_i > z$

q = Banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan

n = Jumlah penduduk

e. Indeks Keparahatan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2)

Merupakan pemberian gambaran dalam mengenai penyebaran pengeluaran antara penduduk miskin. Dimana semakin tinggi nilai indeksnya, maka akan semakin tinggi nilai ketimpangan pada pengeluaran antara penduduk miskin.

Rumus untuk menghitung indeks keparahan kemiskinan sebagai berikut:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left(\frac{z - y_i}{z} \right)^{\alpha}$$

Keterangan:

$\alpha = 2$

z = Garis Kemiskinan

y_i = Rata-rata pengeluaran perkapita dalam sebulan yang berada di bawah garis kemiskinan ($i = 1, 2, 3, \dots, q$) $y_i > z$

q = Banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan

n = Jumlah penduduk

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara umum yakni perbandingan dari melek huruf, harapan hidup, pendidikan serta standart hidup, dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai klasifikasi apakah negara (daerah atau bagian) tersebut adalah negara maju, negara berkembang atau bahkan negara terbelakang. Serta sebagai tolok ukur dalam mengukur pengaruh kebijakan ekonomi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yakni menjelaskan tentang bagaimana penduduk mengakses dari hasil

pembangunan untuk memperoleh pendapatan, kesehatan serta pendidikan. Nilai indeks pembangunan manusia menunjukkan seberapa jauh wilyahnya mencapai sasaran yang telah ditentukan seperti, angka harapan hidup (AHH), pendidikan dasar bagi semua masyarakat, serta tingkat pengeluaran dan konsumsi telah mencapai standart hidup layak. Apabila semakin dekat nilai indeks pembangunan manusia terhadap angka 100 maka semakin dekat pula dalam mencapai sasaran.

Tabel 2.1 Kriteria Pemeringkatan Nilai Indeks Pembangunan Manusia

Nilai IPM	Kategori
<50	Rendah
50 IPM <66	Menengah Kebawah
66 IPM <80	Menengah Keatas
80	Tinggi

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit dalam perhitungan sebagai rata-rata sederhana dari tiga indeks yang menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam memperluas pilihan, oleh karena itu perubahan pada nilai indeks pembangunan manusia terkait dengan perubahan ketiga indicator sebagai berikut:

- a. Indeks Harapan Hidup.
- b. Indeks Pendidikan.
- c. Indeks Standart Hidup Layak.

Maka angka Indeks Pembangunan Manusia dapat dihitung sebagai berikut:

$$IPM = \frac{1}{3} X (IHH + IPd + IP)$$

Keterangan:

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

IHH : Indeks Harapan Hidup

IPd : Indeks Pendidikan

IP : Indeks Pendapatan

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan dasar dari jumlah nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh unit usaha pada suatu daerah atau merupakan jumlah nilai produk yang dihasilkan dari dalam wilayah domestic untuk berkelanjutan yang digunakan sebagai konsumsi akhir masyarakat. Produk domestic regional bruto terdapat 2 macam serta kegunaannya sebagai berikut:

a. Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Berlaku (PDRB ADHB)

Menggambarkan dari nilai tambahan barang serta jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada setiap tahunnya, sedangkan kegunaannya adalah menunjukkan dimana kemampuan suatu daerah memanfaatkan sumber daya ekonominya.

b. Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Konstan (PDRB ADHK)

Menunjukkan bahwa nilai tambahan barang serta jasa tersebutlah yang dihitung, sedangkan kegunaannya adalah digunakan untuk menunjukkan

laju suatu pertumbuhan ekonomi yang secara keseluruhan atau pada setiap komponen dari pengeluaran tahun ke tahun.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 3 pendekatan untuk menghitung angka-angka produk domestik regional bruto sebagai berikut:

a. Menurut Pendekatan Produksi

Adalah jumlah nilai tambahan atas barang serta jasa yang dihasilkan dari berbagai unit produksi wilayah suatu negara pada jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha atau sektor sebagai berikut :

- 1) Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan
- 2) Pertambangan dan penggalan
- 3) Industri pengolahan
- 4) Listrik, gas dan air bersih
- 5) Konstruksi
- 6) Perdagangan, hotel dan restoran
- 7) Pengangkutan dan komunikasi
- 8) Keuangan, real estate dan jasa perusahaan
- 9) Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

Merupakan suatu jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi disuatu negara pada jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa yang dimaksud seperti sewa tanah, upah dan gaji, keuntungan serta bunga modal. Semua itu sebelum

dipotong oleh pajak penghasilan serta pajak langsung lainnya, sehingga definisi dari produk domestik regional bruto ini mencakup penyusutan dan pajak tidak langsung netto (pajak tidak langsung dikurangi oleh subsidi).

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran

Adalah suatu komponen dari permintaan akhir yang terdiri sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga, serta lembaga swasta nirlaba.
- 2) Pengeluaran konsumsi pemerintah
- 3) Perubahan investor
- 4) Pembentukan modal tetap domestik bruto, dan
- 5) Ekspor netto (merupakan ekspor yang dikurangi dengan impor).

Menurut Kuncoro 1997 merupakan pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai suatu pembangunan untuk lebih memfokuskan pada produk domestik regional bruto pada suatu provinsi, kabupaten maupun kota. Sedangkan pada pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angka produk domestik regional bruto. Pada umumnya produk domestik regional bruto dihitung menggunakan dua pendekatan dasar seperti: lapangan usaha/ sisi sektoral serta dari sisi penggunaan. Produk domestik regional bruto juga dihitung berdasarkan atas harga konstan dan atas harga berlaku. Sedangkan untuk total produk domestik regional bruto untuk menunjukkan jumlah keseluruhan nilai tambahan yang dihasilkan dari penduduk dalam periode tertentu.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran secara umum adalah seseorang yang tidak bekerja sama sekali atau sedang aktif dalam mencari pekerjaan atau bekerja kurang dari dua

minggu sebelum pemecatan dari perusahaan untuk memperoleh pekerjaan kembali.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase dari jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerjanya.

Menurut Sukirno (2004) jenis pengangguran yang berdasarkan penyebabnya sebagai berikut:

- a. Pengangguran Friksional : yakni pengangguran yang disebabkan dari dirinya sendiri, dimana sudah memiliki pekerjaan akan tetapi masih menari pekerjaan lain yang sesuai dengan keinginannya atau lebih baik lagi.
- b. Pengangguran Siklikal : yakni pengangguran yang diakibatkan dari kemerosotan perusahaan atau menutup sehingga semakin meningkat penganggurannya.
- c. Pengangguran Struktural : yakni pengangguran yang disebabkan karena adanya perubahan dalam structural perekonomiannya.
- d. Pengangguran Teknologi : yakni pengangguran yang diakibatkan dari kecanggihan teknologi yang semakin berkembang sehingga perusahaan lebih menggunakan teknologi dibandingkan dengan tenaga kerja sehingga meningkatkan pengangguran.

Jenis pengangguran yang berdasarkan cirri-cirinya sebagai berikut:

- a. Pengangguran Terbuka : yakni pengangguran yang diakibatkan dari lonjakan permintaan tenaga kerja yang tidak sebanding dengan lowongan pekerjaannya sehingga berdampak menganggur penuh. Menurut Sumarsono (2009) dimana pengangguran terbuka (*Open Unemployment*) dimana

masyarakatnya tidak bekerja secara baik, baik secara sukarela ataupun terpaksa.

- b. Pengangguran Tersembunyi : yakni pengangguran yang terjadi pada beberapa sektor terutama sektor pertanian ataupun sektor jasa yang diakibatkan dari kelebihan tenaga kerja yang diperkerjakan.
- c. Pengangguran Bermusim : yaitu pengangguran yang terjadi terutama pada sektor pertanian dan perikanan yang diakibatkan dari musim sehingga lahan yang tidak dapat digunakan sewaktu-waktu.

Menurut Mankiw (2006) dimana persentase dari angkatan kerja yang tidak bekerja disebut dengan tingkat pengangguran (*unemployment rate*).

Rumus yang digunakan untuk menghitung yaitu:

$$\text{Tingkat pengangguran} = \frac{\text{Jumlah yang tidak bekerja}}{\text{Angkatan kerja}} \times 100$$

C. Pengaruh Variable Independen Terhadap Variable Dependen

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan

Menurut Todaro (2000) yakni menyatakan bahwa pembangunan manusia adalah tujuan dalam pembangunan itu sendiri. Dimana pembangunan manusia memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap kecanggihan teknologi modern serta mengembangkan kapasitas supaya terciptanya pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kemiskinan

Menurut Wongdesmiwati (2009) menyebutkan bahwa penurunan kemiskinan dapat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan produk domestik bruto

(PDB) rill serta faktor pendukung lainnya, seperti investasi yang melalui penyerapan tenaga kerja yang dilakukan pihak swasta serta pemerintah, dimana perkembangan teknologi yang semakin canggih, inovatif dan produktif serta pertumbuhan penduduk dengan melalui peningkatan modal manusia.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Tingkat Kemiskinan

Menurut Sukirno (1997) pengangguran memiliki efek buruk dimana pengangguran yang mengurangi pendapatan masyarakat sehingga mengurangi tingkat kemakmuran yang akan dicapai seseorang. Semakin turun kesejahteraan masyarakat maka akan semakin naik tingkat kemiskinan yang diakibatkan terjebaknya pada posisi yang tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran pada suatu wilayah/ daerah semakin buruk, maka kekacauan politik serta social akan berlaku sehingga menimbulkan efek yang buruk pada prospek pembangunan ekonomi pada jangka panjang.

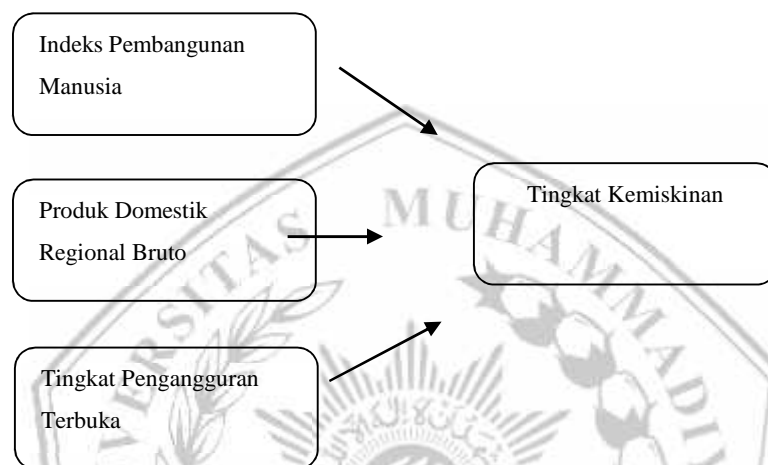
D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yakni menjelaskan bahwa kemiskinan dipengaruhi dari tiga variable pembangunan ekonomi seperti: variable Indeks Pembangunan Manusia dan Produk Domestik Regional Bruto dan Tingkat Pengangguran Terbuka dimana variable-variabel tersebut adalah variable independen (bebas), sedangkan variable Tingkat Kemiskinan yakni adalah variabel dependen (terkait) yang dimana variable tingkat kemiskinan ini diukur dengan alat regresi untuk mendapatkan hasil yang signifikan setiap variable independen dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan. Variable independen diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pemerintah yang

terkait dengan penyebab tingkat kemiskinan kabupaten/kota di kawasan pulau madura agar mendapatkan suatu kebijakan yang relevan untuk upaya mengatasi tingkat kemiskinan. Dapat digambarkan secara skema sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



E. Hipotesis

Hipotesis adalah dimana jawaban yang bersifat sementara terhadap penelitian hingga bukti dimana melalui data sudah terkumpul. Menurut kerangka diatas, penelitian meumuskan bahwa hipotesis pada penelitian sebagai berikut:

1. H1 : Diduga bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan kabupaten/kota dikawasan pulau madura.
2. H2 : Diduga bahwa Produk Regional Bruto berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan kabupaten/kota dikawasan pulau madura.

3. H3 : Diduga bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan kabupaten/kota dikawasan pulau madura.

